

**ANALISIS KINERJA PERBANKAN DI INDONESIA SEBELUM DAN SESUDAH PENGALIHAN FUNGSI PENGATURAN DAN PENGAWASAN PERBANKAN DARI BANK INDONESIA KE OTORITAS JASA KEUANGAN (STUDI PADA PERBANKAN BUMN DAN PERBANKAN YANG MELAKUKAN MERGER DAN AKUISISI LINTAS NEGARA)**

M. Fachrul Reza<sup>1)</sup>

Andewi Rokhmawati<sup>2)</sup>

<sup>1)</sup> Mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Riau

<sup>2)</sup> Dosen Program Pascasarjana Universitas Riau

**Abstract.** *The purpose of this study to determine differences in the performance of banks in Indonesia, especially BUMN's Banking and Banking implementing Merger and Acquisition Cross Country, using the study period of 2 years before and 2 years after the transfer of regulatory and supervisory functions Perbankan dari Bank Indonesia to the Financial Services Authority.*

*The population in this study are all BUMN's Banking and Banking conducting mergers and acquisitions by foreign parties from 2012 to 2015. The sample used in this study was 14 Bank which consists of 4 BUMN's Banking and 10 Banking conducting Transnational Merger and Acquisition . Methods of data analysis research using purposive sampling method by using paired sample t-test analysis and independent sample t-test.*

*The result of research shows that BUMN's Banking only BOPO and LDR variables are significant, while CAR, NPL and ROA variables are not significantly different. In Banking that perform merger and Acquisition of Cross Country only variable of NPL, ROA and BOPO there are significant difference whereas CAR and LDR variable there is no significant difference. In the BUMN's Banking and Banking implementing Merger and Acquisition Cross Country After Transfer of functions Regulation and Supervision of Banking of Bank Indonesia to the Financial Services Authority, only ROA and BOPO that there are significant differences, while variable CAR, NPL and LDR is not a significant difference .*

**Keywords:** CAR, NPL, ROA, BOPO, LDR

## **PENDAHULUAN**

Sistem perbankan merupakan suatu sistem yang saling berhubungan dan terkait, kegagalan suatu bank tidak hanya menyebabkan masalah pada individual bank. Kegagalan suatu bank akan dapat menimbulkan efek domino dalam industri perbankan. Kegagalan

pada industri perbankan (*bank failure*) pada gilirannya akan menimbulkan kegagalan pada sektor perusahaan (*corporate failure*), yaitu akan terjadi hambatan dalam penyelesaian pembayaran (*payment settlement*). Kegagalan pada industri perbankan akan berdampak negatif terhadap seluruh

sistem (*systemic risk*) perekonomian. Kesehatan atau kondisi keuangan dan non keuangan bank merupakan kepentingan semua pihak terkait, baik pemilik, masyarakat pengguna jasa bank maupun Bank Indonesia selaku otoritas pengawas bank. Kondisi tersebut dapat digunakan oleh pihak-pihak terkait tersebut untuk mengevaluasi kinerja bank dalam menerapkan prinsip kehati-hatian, kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku dan manajemen.

Untuk mewujudkan perekonomian nasional yang mampu tumbuh secara berkelanjutan dan stabil diperlukan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan yang terselenggara secara teratur, adil, transparan dan akuntabel serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, sehingga diperlukan adanya otoritas yang memiliki fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan di dalam sector jasa keuangan secara terpadu, independen dan akuntabel.

Dari uraian diatas berupa fenomena tentang Perbankan BUMN dan Perbankan yang melakukan Merger dan Akuisisi Lintas Negara (CBMA) pada industri Perbankan di Indonesia, kemudian adanya peristiwa bersejarah dimana terjadinya pengalihan fungsi Pengaturan dan Pengawasan perbankan dari Bank Indonesia yang merupakan Bank Sentral Republik Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan adanya perbedaan hasil penelitian oleh para peneliti sebelumnya serta masih terbatasnya penelitian sejenis di Indonesia membuat penulis bermaksud untuk mengadakan penelitian agar dapat mengetahui perbandingan kinerja

Perbankan BUMN dan kinerja Perbankan yang melakukan Merger dan Akuisisi Lintas Negara (CBMA) di Indonesia sebelum dan sesudah pengalihan fungsi Pengaturan dan Pengawasan Perbankan dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan.

Penilaian kinerja perusahaan perbankan sangat penting dilakukan bagi manajemen, pemegang saham, pemerintah maupun pihak lain yang berkepentingan. Untuk menilai kinerja Perbankan umumnya digunakan lima aspek yaitu CAMEL (*Capital, Asset, Quality Management, Earning and Liquidity*) dengan menggunakan rasio keuangan ; *Capital Adequacy Ratio (CAR)*, *Return on Asset (ROA)*, Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), dan *Loan to Deposit Ratio (LDR)*. Dimana jumlah tahun yang digunakan untuk meneliti kinerja Perbankan BUMN dan Perbankan yang melakukan Merger dan Akuisisi Lintas Negara (CBMA) ini adalah dua tahun sebelum dan sesudah pengalihan fungsi Pengaturan dan Pengawasan Perbankan dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan. Hal ini disebabkan karena pengalihan Fungsi Pengaturan dan Pengawasan Perbankan dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan dilakukan pada tanggal 31 Desember 2013. Sehingga *time frame* penelitian yang mengambil jangka waktu dua tahun sebelum dan dua tahun sesudah merupakan waktu yang relevan melihat kesediaan data dan informasi terkait penelitian yang digunakan.

Adapun judul penelitian yaitu “ANALISIS KINERJA PERBANKAN DI INDONESIA SEBELUM DAN SESUDAH PENGALIHAN FUNGSI

PENGATURAN DAN PENGAWASAN PERBANKAN DARI BANK INDONESIA KE OTORITAS JASA KEUANGAN (STUDI PADA PERUSAHAAN PERBANKAN BUMN DAN PERBANKAN YANG MELAKUKAN MERGER DAN AKUISISI LINTAS NEGARA / *CROSS BORDER MERGER & ACQUISITION*)”.

### **Kerangka Pemikiran**

Perjalanan fungsi pengaturan dan pengawasan Bank ketika masih menjadi bagian dari tugas Bank Indonesia seiring berjalannya waktu senantiasa mengikuti perkembangan zaman. Ketika bisnis Bank mulai terintegrasi dengan pasar modal, asuransi dan bursa komoditas, urusan pengawasan pun semakin kompleks. Hal ini disebabkan ada resiko-resiko baru yang berada di luar domain pengawas Bank di Bank Indonesia. Berangkat dari fenomena tersebutlah diperlukan sebuah otoritas yang mampu menjawab tantangan yang ada khususnya dalam bidang pengawasan Bank yang dewasa ini semakin kompleks dan terintegrasi dengan pasar modal, asuransi dan bursa komoditas.

CAR adalah rasio yang memperlihatkan seberapa besar jumlah seluruh aset Bank yang mengandung risiko (kredit, penyertaan, surat berharga, dan tagihan pada bank lain) ikut dibiayai dari modal sendiri (modal inti) disamping memperoleh dana-dana dari sumber-sumber diluar Bank (modal pelengkap). Selain itu sejak tahun 2015, perhitungan ATMR Risiko Kredit diselaraskan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 11/POJK.03/2015 Tentang Ketentuan Kehati-hatian Dalam Rangka Stimulus Perekonomian Nasional Bagi Bank

Umum. Dalam ketentuan tersebut diatur perubahan perhitungan bobot risiko kredit untuk jenis kredit Konsumsi, KPR, KPA dan kredit kepada UMKM. Hal ini juga kemungkinan akan berpengaruh pada permodalan dari Perbankan itu sendiri.

Bank sebagai lembaga intermediasi yaitu menyalurkan dana pihak ketiga (deposan) kepada pihak yang membutuhkannya. Namun tidak semua penyaluran dana tersebut dapat berjalan dengan semestinya. Rasio Non Performing Loan (NPL) digunakan dalam mengukur resiko Bank atas kemungkinan tidak kembalinya kredit yang diberikan terhadap total pinjaman yang diberikan. Semakin kecil rasio ini maka semakin bagus kualitas aktiva perusahaan.

Rasio yang digunakan berikutnya yaitu Return on Asset (ROA) dan Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional. ROA merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan Bank dalam memanfaatkan seluruh aktiva yang baik lancar maupun tidak lancar untuk memperoleh laba. Kinerja Perbankan tercermin salah satunya melalui rasio profitabilitas yang dihasilkan oleh Bank tersebut. Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan berbagai kebijakan yang memudahkan dan fleksibel bagi pelaku industri Perbankan sehingga Perbankan khususnya Perbankan memiliki kesempatan yang besar untuk meningkatkan profitabilitasnya.

Para Bankir melihat, selama industri perbankan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, tata kelola di Industri Keuangan khususnya Perbankan menjadi lebih terarah dan terukur. Terlebih sikap OJK yang lebih transparan telah

meningkatkan keyakinan industry keuangan terhadap Otoritas Jasa Keuangan, sehingga mampu mendorong kinerja Perbankan untuk tumbuh lebih positif lagi (<http://infobanknews.com/kinerja-ojk-di-mata-bankir/>)

Para Bankir juga menilai kebijakan yang dikeluarkan OJK sangat baik untuk pengembangan industry Perbankan ke depan. Hal ini sangat penting karena begitu banyak inovasi produk dan layanan yang sangat potensial untuk dikembangkan di Indonesia. Program pendalaman pasar juga sangat ditentukan oleh instrument Perbankan atau sector keuangan yang ditawarkan Perbankan. Dengan adanya pendalaman pasar ini juga akan sangat berpengaruh terhadap perkembangan kinerja Perbankan kearah yang lebih positif (<http://infobanknews.com/ini-penilaian-bank-asing-terhadap-kinerja-ojk/>)

Otoritas Jasa Keuangan senantiasa menekankan pentingnya bagi Perbankan di Indonesia agar lebih efisien dalam menjalankan bisnisnya. Oleh karena itu peralihan fungsi pengaturan dan pengawasan Bank dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa keuangan dapat berpengaruh terhadap rasio BOPO Perbankan yang beroperasi di Indonesia khususnya perbankan. Namun beberapa peraturan yang dikeluarkan Otoritas Jasa Keuangan pasca fungsi pengaturan dan pengawasan Perbankan beralih dari Bank Indonesia juga dikhawatirkan dapat meningkatkan nilai BOPO dari Perbankan. Salah satu faktor penyebab terjadinya peningkatan rata-rata rasio BOPO tersebut adalah peningkatan pencadangan risiko kredit sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 11/POJK.03/2015

Tentang Ketentuan Kehati-hatian Dalam Rangka Stimulus Perekonomian Nasional Bagi Bank Umum. Walaupun dasar dari kebijak tersebut adalah baik yaitu dalam rangka kehati-hatian untuk keselamatan dan kesehatan Perbankan di Indonesia, namun dikhawatirkan kebijakan tersebut kurang berdampak baik terhadap beban operasional yang harus dikeluarkan oleh Perbankan.

Likuiditas adalah kemampuan perusahaan menggunakan aktiva lancarnya untuk memenuhi hutang-hutang jangka pendek yang jatuh tempo. Rasio yang digunakan untuk mengukur kinerja adalah Loan to Deposit Ratio (LDR). Dalam UU Otoritas Jasa Keuangan No. 21 tahun 2011, disebutkan bahwa sumber dana anggaran Otoritas Jasa Keuangan berasal dari APBN dan iuran dari Pihak yang diawasi dimana salah satunya adalah sector Perbankan. Apabila nantinya aturan ini diterapkan dan dasar pemungutan iuran didasarkan pada likuiditas masing-masing Bank, maka tentunya pengalihan ini akan membawa dampak pada likuiditas Perbankan khususnya Perbankan yang tercermin melalui rasio LDR.

Pada penelitian ini, kinerja Perbankan akan dilihat dari keadaan yang berbeda yaitu sebelum dan sesudah pengalihan fungsi pengaturan dan pengawasan Perbankan dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan. Adapun variable yang digunakan untuk mengukur kinerja yaitu *Capital Adequacy Ratio (CAR)*, *Net Performing Loan (NPL)*, *Return on Asset (ROA)*, Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), dan *Loan to Deposit Ratio (LDR)*.

## Hipotesis

### **H1: Perbandingan antara Kinerja Perbankan BUMN sebelum dan sesudah Pengalihan Fungsi Pengaturan dan Pengawasan dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan.**

H1.1: Terdapat perbedaan CAR pada Perbankan BUMN sebelum dan sesudah pengalihan fungsi pengaturan dan Pengawasan Perbankan dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan.

H1.2: Terdapat perbedaan NPL pada Perbankan BUMN sebelum dan sesudah pengalihan fungsi pengaturan dan Pengawasan Perbankan dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan.

H1.3: Terdapat perbedaan ROA pada Perbankan BUMN sebelum dan sesudah pengalihan fungsi pengaturan dan Pengawasan Perbankan dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan.

H1.4: Terdapat perbedaan BOPO pada Perbankan BUMN sebelum dan sesudah pengalihan fungsi pengaturan dan Pengawasan Perbankan dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan.

H1.5: Terdapat perbedaan LDR pada Perbankan BUMN sebelum dan sesudah pengalihan fungsi pengaturan dan Pengawasan Perbankan dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan.

### **H2: Perbandingan antara Kinerja Perbankan yang melakukan Cross Border Merger & Acquisition (CBMA) sebelum dan sesudah Pengalihan Fungsi Pengaturan dan Pengawasan dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan.**

H2.1: Terdapat perbedaan CAR pada Perbankan yang melakukan CBMA sebelum dan sesudah pengalihan fungsi pengaturan dan Pengawasan Perbankan dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan.

H2.2: Terdapat perbedaan NPL pada Perbankan yang melakukan CBMA sebelum dan sesudah pengalihan fungsi pengaturan dan Pengawasan Perbankan dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan.

H2.3: Terdapat perbedaan ROA pada Perbankan yang melakukan CBMA sebelum dan sesudah pengalihan fungsi pengaturan dan Pengawasan Perbankan dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan.

H2.4: Terdapat perbedaan BOPO pada Perbankan yang melakukan CBMA sebelum dan sesudah pengalihan fungsi pengaturan dan Pengawasan Perbankan dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan.

H2.5: Terdapat perbedaan LDR pada Perbankan yang melakukan CBMA sebelum dan sesudah pengalihan fungsi pengaturan dan Pengawasan Perbankan dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan.

### **H3: Perbandingan Kinerja Perbankan BUMN dan kinerja Perbankan yang melakukan CBMA sesudah Pengalihan Fungsi Pengaturan dan Pengawasan dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan.**

H3.1: Terdapat perbedaan CAR pada Perbankan BUMN dan Perbankan yang melakukan CBMA sesudah pengalihan fungsi pengaturan dan Pengawasan Perbankan dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan.

H3.2: Terdapat perbedaan NPL pada Perbankan BUMN dan Perbankan yang

melakukan CBMA sesudah pengalihan fungsi pengaturan dan Pengawasan Perbankan dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan.

H3.3: Terdapat perbedaan ROA pada Perbankan BUMN dan Perbankan yang melakukan CBMA sesudah pengalihan fungsi pengaturan dan Pengawasan Perbankan dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan.

H3.4: Terdapat perbedaan BOPO pada Perbankan BUMN dan Perbankan yang melakukan CBMA sesudah pengalihan fungsi pengaturan dan Pengawasan Perbankan dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan.

H3.5: Terdapat perbedaan LDR pada Perbankan BUMN dan Perbankan yang

melakukan CBMA sesudah pengalihan fungsi pengaturan dan Pengawasan Perbankan dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan.

### Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan membandingkan dua kelompok data mengenai kinerja Perbankan Perbankan BUMN dan Perbankan yang melakukan Merger dan Akuisisi Lintas sebelum dan sesudah pengalihan fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan. Penelitian ini menggunakan studi deskriptif.

Tabel 3.2 Perbankan BUMN

No.	Nama Bank	Komposisi Kepemilikan Pemerintah
1	PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk	60 %
2	PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk	56,75 %
3	PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk	60 %
4	PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk	60,04 %

Sumber : InfoBank (Data diolah)

Tabel 3.3 Perbankan yang melakukan CBMA

No.	Nama Bank	Jumlah Kepemilikan Saham (%)	Tahun CBMA
1	PT. Bank CIMB Niaga, Tbk	61	2002
2	PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk	67,84	2003
3	PT. Maybank Indonesia, Tbk	55,60	2003
4	PT. Bank OCBC NISP, Tbk	85,06	2004
5	Permata Bank	89,01	2004
6	PT. Bank Buana Indonesia, Tbk	53	2004
7	Bank Nusantara Parahyangan	75,41	2007
8	Bank of India Indonesia	70	2007
9	Bank Ekonomi HSBC	88,89	2008
10	PT. Bank QNB Indonesia, Tbk	69,59	2011

Sumber : InfoBank (Data diolah)

### Teknik Analisis Data

Dalam menganalisa data untuk penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik analisis laporan keuangan, sedangkan ukuran yang digunakan untuk mengukur kinerja adalah dengan menggunakan ukuran rasio.

Untuk membuktikan hipotesis (dugaan sementara berdasarkan teori) diperlukan uji hipotesis. Adapun pengujian yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan alat uji *paired sample t test* dan *independent sampel t test*.

### Uji Asumsi

Terdapat persyaratan yang harus dipenuhi sebelum dilakukan uji t, diantaranya harus dilakukan :

#### – Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah suatu variabel normal atau tidak. Normal disini dalam arti mempunyai distribusi data yang normal. Untuk menguji normalitas data dapat menggunakan uji *One Sample Kolmogorov-Smirnov Test* dengan ketentuan jika  $Asymp. Sig > 0,05$  maka data berdistribusi normal.

#### – Uji Homogenitas

Uji homogenitas digunakan untuk menguji apakah dalam sebuah model *t-test* data homogen atau tidak. Apabila homogenitas terpenuhi maka peneliti dapat melakukan pada tahap analisa data lanjutan, apabila tidak maka harus ada pembetulan-pembetulan metodologis.

### Uji Beda

#### – Paired Sample t Test

Uji beda t-test (*Paired Sample t Test*) digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata dua sampel (dua kelompok) yang berpasangan atau berhubungan. Dalam penelitian ini Uji beda t-test (*Paired Sample t Test*) digunakan untuk melihat apakah terdapat perbedaan yang signifikan pada kinerja Perbankan BUMN dan kinerja Perbankan CBMA masing-masing sebelum dan sesudah pengalihan fungsi pengaturan dan pengawasan dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan.

Rumus perhitungannya adalah :

$$t = \frac{\bar{X}_D - \mu_0}{s_D / \sqrt{n}}$$

Dimana,

$$\bar{X}_d = \frac{\sum D}{n}$$

$$s_d = \sqrt{\frac{1}{n-1} \left\{ \sum D^2 - \frac{(\sum D)^2}{n} \right\}}$$

dimana

D = Selisih x1 dan x2 (x1-x2)

n = Jumlah Sampel

X bar = Rata-rata

S d = Standar Deviasi dari d

#### – Independent Sample t Test

*Independent Sample T Test* merupakan uji parametrik yang digunakan untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan rata-rata antar dua kelompok sampel yang

tidak berhubungan. Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan terhadap kinerja Perbankan BUMN dan kinerja Perbankan yang melakukan CBMA sesudah terjadinya pengalihan fungsi pengaturan dan pengawasan dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan.

Perhitungan menggunakan rumus :

$$t = \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2}{\sqrt{\frac{(n_1 - 1)s_1^2 + (n_2 - 1)s_2^2}{n_1 + n_2 - 2} \left( \frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2} \right)}}$$

dimana

$\bar{X}_1$  = rata-rata sampel 1

$\bar{X}_2$  = rata-rata sampel 2

$n_1$  = jumlah sampel 1

$n_2$  = jumlah sampel 2

$s_1$  = simpangan baku sampel 1

$s_2$  = simpangan baku sampel 2

### Hasil dan Pembahasan

#### 4.3.1 Perbandingan antara Kinerja Perbankan BUMN sebelum dan sesudah Pengalihan Fungsi Pengaturan dan Pengawasan dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan.

Dengan menggunakan bantuan SPSS 21.00 didapatlah hasil *Paired Sample t Test* masing-masing variabel kinerja Perbankan BUMN sebelum dan sesudah pengalihan fungsi pengaturan dan pengawasan dari Bank Indonesia ke



Otoritas Jasa Keuangan seperti yang terlihat pada table beriku

Tabel 4.33 *Paired Sample t Test* Perbankan BUMN

		Paired Differences				t	df	Sig. (2-tailed)	
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
					Lower				Upper
Pair 1	PreCAR - PostCAR	-1.49375	2.46164	.87032	-3.55173	.56423	-1.716	7	.130
Pair 2	PreNPL - PostNPL	.00250	.53516	.18921	-.44490	.44990	.013	7	.990
Pair 3	PreROA - PostROA	.36625	.49883	.17636	-.05078	.78328	2.077	7	.076
Pair 4	PreBOPO - PostBOPO	-4.68125	4.09467	1.44768	-8.10448	-1.25802	-3.234	7	.014
Pair 5	PreLDR - PostLDR	-4.21625	3.66952	1.29737	-7.28404	-1.14846	-3.250	7	.014

Sumber : Data olahan SPSS

#### 4.3.1.1 CAR pada Perbankan BUMN sebelum dan sesudah pengalihan fungsi pengaturan dan Pengawasan Perbankan dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan (H1.1).

Pengambilan keputusan berdasarkan perbandingan t hitung dengan t table. T hitung -1.716 dengan tingkat sig (2 tailed) = 0.130 dengan df = N-2 = 8-2 = 6 sehingga nilai t table = 2.4469 pada taraf signifikansi ( $\alpha = 0.05$ ). Jika t hitung  $\geq$  t table maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima. Jika t hitung  $\leq$  t table maka  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak. Ternyata t hitung < dari t table atau -1.716 < 2.4469 maka  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak. Tidak terdapat perbedaan kinerja CAR Perbankan BUMN sebelum dan sesudah pengalihan fungsi pengaturan dan pengawasan Perbankan dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan.

#### 4.3.1.2 NPL pada Perbankan BUMN sebelum dan sesudah pengalihan fungsi pengaturan dan Pengawasan Perbankan dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan (H1.2).

Pengambilan keputusan berdasarkan perbandingan t hitung dengan t table. T hitung 0.013 dengan tingkat sig (2 tailed) = 0.990 dengan df = N-2 = 8-2 = 6 sehingga nilai t table = 2.4469 pada taraf signifikansi ( $\alpha = 0.05$ ). Jika t hitung  $\geq$  t table maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima. Jika t hitung  $\leq$  t table maka  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak. Ternyata t hitung < dari t table atau 0.013 < 2.4469 maka  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak. Tidak terdapat perbedaan kinerja NPL Perbankan BUMN sebelum dan sesudah pengalihan fungsi pengaturan dan pengawasan Perbankan dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan.

#### 4.3.1.3 ROA pada Perbankan BUMN sebelum dan sesudah pengalihan fungsi pengaturan dan Pengawasan Perbankan dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan. (H1.3)

Pengambilan keputusan berdasarkan perbandingan  $t$  hitung dengan  $t$  table.  $T$  hitung 2.077 dengan tingkat sig (2 tailed) = 0.076 dengan  $df = N-2 = 8-2 = 6$  sehingga nilai  $t$  table = 2.4469 pada taraf signifikansi ( $\alpha = 0.05$ ). Jika  $t$  hitung  $\geq t$  table maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima. Jika  $t$  hitung  $\leq t$  table maka  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak. Ternyata  $t$  hitung < dari  $t$  table atau  $2.077 < 2.4469$  maka  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak. Tidak terdapat perbedaan kinerja ROA Perbankan BUMN sebelum dan sesudah pengalihan fungsi pengaturan dan pengawasan Perbankan dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan.

#### **4.3.1.4 BOPO pada Perbankan BUMN sebelum dan sesudah pengalihan fungsi pengaturan dan Pengawasan Perbankan dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan.(H1.4)**

Pengambilan keputusan berdasarkan perbandingan  $t$  hitung dengan  $t$  table.  $T$  hitung -3.234 dengan tingkat sig (2 tailed) = 0.014 dengan  $df = N-2 = 8-2 = 6$  sehingga nilai  $t$  table = 2.4469 pada taraf signifikansi ( $\alpha = 0.05$ ). Jika  $t$  hitung  $\geq t$  table maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima. Jika  $t$  hitung  $\leq t$  table maka  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak. Ternyata  $t$  hitung > dari  $t$  table atau  $3.234 > 2.4469$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima. Terdapat perbedaan kinerja BOPO

Perbankan BUMN sebelum dan sesudah pengalihan fungsi pengaturan dan pengawasan Perbankan dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan.

#### **4.3.1.5 LDR pada Perbankan BUMN sebelum dan sesudah pengalihan fungsi pengaturan dan Pengawasan Perbankan dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan. (H1.5)**

Pengambilan keputusan berdasarkan perbandingan  $t$  hitung dengan  $t$  table.  $T$  hitung -3.250 dengan tingkat sig (2 tailed) = 0.014 dengan  $df = N-2 = 8-2 = 6$  sehingga nilai  $t$  table = 2.4469 pada taraf signifikansi ( $\alpha = 0.05$ ). Jika  $t$  hitung  $\geq t$  table maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima. Jika  $t$  hitung  $\leq t$  table maka  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak. Ternyata  $t$  hitung > dari  $t$  table atau  $3.250 > 2.4469$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima. Terdapat perbedaan kinerja LDR Perbankan BUMN sebelum dan sesudah pengalihan fungsi pengaturan dan pengawasan Perbankan dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan.

#### **4.3.2 Perbandingan antara Kinerja Perbankan yang melakukan Merger dan Akuisisi Lintas Negara (CBMA) sebelum dan sesudah Pengalihan Fungsi Pengaturan dan Pengawasan dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan.**

Tabel 4.34 *Paired Sample t Test* Perbankan yang melakukan CBMA

		Paired Differences					t	df	Sig. (2-tailed)
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
					Lower	Upper			
Pair 1	PreCAR - PostCAR	-.26850	4.37844	.97905	-2.31767	1.78067	-.274	19	.787
Pair 2	PreNPL - PostNPL	-1.54600	1.71926	.38444	-2.35064	-.74136	-4.021	19	.001
Pair 3	PreROA - PostROA	.89500	1.29691	.29000	.28803	1.50197	3.086	19	.006
Pair 4	PreBOPO - PostBOPO	-7.29950	12.77291	2.85611	-13.27741	-1.32159	-2.556	19	.019
Pair 5	PreLDR - PostLDR	-.24500	5.56861	1.24518	-2.85119	2.36119	-.197	19	.846

Sumber : Data olahan SPSS

#### 4.3.2.2 NPL pada Perbankan yang melakukan CBMA sebelum dan sesudah pengalihan fungsi pengaturan dan Pengawasan Perbankan dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan. (H2.2)

Pengambilan keputusan berdasarkan perbandingan  $t$  hitung dengan  $t$  table.  $T$  hitung  $-4.021$  dengan tingkat sig (2 tailed) =  $0.001$  dengan  $df = N-2 = 20-2 = 18$  sehingga nilai  $t$  table =  $2.1009$  pada taraf signifikansi ( $\alpha = 0.05$ ). Jika  $t$  hitung  $\geq t$  table maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima. Jika  $t$  hitung  $\leq t$  table maka  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak. Ternyata  $t$  hitung  $>$  dari  $t$  table atau  $4.021 > 2.4469$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima. Terdapat perbedaan kinerja NPL Perbankan yang melakukan Merger dan Akuisisi Lintas Negara (CBMA) sebelum dan sesudah pengalihan fungsi pengaturan dan pengawasan Perbankan dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan.

#### 4.3.2.1 CAR pada Perbankan yang melakukan CBMA sebelum dan sesudah pengalihan fungsi pengaturan dan Pengawasan Perbankan dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan. (H2.1)

Pengambilan keputusan berdasarkan perbandingan  $t$  hitung dengan  $t$  table.  $T$  hitung  $-0.274$  dengan tingkat sig (2 tiled) =  $0.787$  dengan  $df = N-2 = 20-2 = 18$  sehingga nilai  $t$  table =  $2.1009$  pada taraf signifikansi ( $\alpha = 0.05$ ). Jika  $t$  hitung  $\geq t$  table maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima. Jika  $t$  hitung  $\leq t$  table maka  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak. Ternyata  $t$  hitung  $<$  dari  $t$  table atau  $-0.274 < 2.4469$  maka  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak. Tidak terdapat perbedaan kinerja CAR Perbankan yang melakukan Merger dan Akuisisi Lintas Negara (CBMA) sebelum dan sesudah pengalihan fungsi pengaturan dan pengawasan Perbankan dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan.

#### **4.3.2.3 ROA pada Perbankan yang melakukan CBMA sebelum dan sesudah pengalihan fungsi pengaturan dan Pengawasan Perbankan dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan. (H2.3)**

Pengambilan keputusan berdasarkan perbandingan  $t$  hitung dengan  $t$  table.  $T$  hitung 3.086 dengan tingkat sig (2 tailed) = 0.006 dengan  $df = N-2 = 20-2 = 18$  sehingga nilai  $t$  table = 2.1009 pada taraf signifikansi ( $\alpha = 0.05$ ). Jika  $t$  hitung  $\geq t$  table maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima. Jika  $t$  hitung  $\leq t$  table maka  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak. Ternyata  $t$  hitung  $>$  dari  $t$  table atau  $3.086 > 2.4469$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima. Terdapat perbedaan kinerja ROA Perbankan yang melakukan Merger dan Akuisisi Lintas Negara (CBMA) sebelum dan sesudah pengalihan fungsi pengaturan dan pengawasan Perbankan dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan.

#### **4.3.2.4 BOPO pada Perbankan yang melakukan CBMA sebelum dan sesudah pengalihan fungsi pengaturan dan Pengawasan Perbankan dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan. (H2.4)**

Pengambilan keputusan berdasarkan perbandingan  $t$  hitung dengan  $t$  table.  $T$  hitung -2.556 dengan tingkat sig (2 tailed) = 0.019 dengan  $df = N-2 = 20-2 = 18$  sehingga nilai  $t$  table = 2.1009 pada taraf signifikansi ( $\alpha = 0.05$ ). Jika  $t$  hitung  $\geq t$  table maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima. Jika  $t$  hitung  $\leq t$  table maka  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak. Ternyata  $t$

hitung  $>$  dari  $t$  table atau  $2.556 > 2.4469$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima. Terdapat perbedaan kinerja BOPO Perbankan yang melakukan Merger dan Akuisisi Lintas Negara (CBMA) sebelum dan sesudah pengalihan fungsi pengaturan dan pengawasan Perbankan dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan

#### **4.3.2.5 LDR pada Perbankan yang melakukan CBMA sebelum dan sesudah pengalihan fungsi pengaturan dan Pengawasan Perbankan dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan. (H2.5)**

Pengambilan keputusan berdasarkan perbandingan  $t$  hitung dengan  $t$  table.  $T$  hitung -0.197 dengan tingkat sig (2 tailed) = 0.846 dengan  $df = N-2 = 20-2 = 18$  sehingga nilai  $t$  table = 2.1009 pada taraf signifikansi ( $\alpha = 0.05$ ). Jika  $t$  hitung  $\geq t$  table maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima. Jika  $t$  hitung  $\leq t$  table maka  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak. Ternyata  $t$  hitung  $<$  dari  $t$  table atau  $-0.197 < 2.4469$  maka  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak. Tidak terdapat perbedaan kinerja LDR Perbankan yang melakukan Merger dan Akuisisi Lintas Negara (CBMA) sebelum dan sesudah pengalihan fungsi pengaturan dan pengawasan Perbankan dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan.

#### **4.3.3.1 CAR pada Perbankan BUMN dan Perbankan yang melakukan CBMA sesudah pengalihan fungsi pengaturan dan Pengawasan Perbankan dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan. (H3.1)**

ANALISIS KINERJA PERBANKAN DI INDONESIA SEBELUM DAN SESUDAH PENGALIHAN FUNGSI PENGATURAN DAN PENGAWASAN PERBANKAN DARI BANK INDONESIA KE OTORITAS JASA KEUANGAN (STUDI PADA PERBANKAN BUMN DAN PERBANKAN YANG MELAKUKAN MERGER DAN AKUISISI LINTAS NEGARA)

Tabel 4.35 *Independent Sample t Test* Rasio CAR Perbankan BUMN dan Perbankan yang melakukan CBMA

		Independent Samples Test								
		Levene's Test for Equality of Variances		t-test for Equality of Means						
		F	Sig.	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
								Lower	Upper	
Rasio CAR	Equal variances assumed	.058	.811	1.039	26	.308	.97675	.93983	-.95509	2.90859
	Equal variances not assumed			1.133	15.724	.274	.97675	.86205	-.85332	2.80682

Sumber : Data olahan SPSS

Pengambilan keputusan berdasarkan perbandingan t hitung dengan t table. T hitung 1.039 dengan tingkat sig (2 tiled) = 0.308 dengan df = N-2 = 28-2 = 26 sehingga nilai t table = 2.0555 pada taraf signifikansi ( $\alpha = 0.05$ ). Jika t hitung  $\geq$  t table maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima. Jika t hitung  $\leq$  t table maka  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak. Ternyata t hitung < dari t table atau 1.039 < 2.0555 maka  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak. Tidak terdapat perbedaan kinerja CAR Perbankan BUMN dan Perbankan yang melakukan Merger dan Akuisisi Lintas Negara (CBMA) sesudah pengalihan fungsi pengaturan dan pengawasan Perbankan dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan

**4.3.3.2 NPL pada Perbankan BUMN dan Perbankan yang melakukan CBMA sesudah pengalihan fungsi pengaturan dan Pengawasan Perbankan dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan. (H3.2)**

Dengan menggunakan bantuan SPSS 21.00 didapatlah hasil *IndependentSample t Test* masing-masing variabel kinerja rasio NPL Perbankan BUMN dan Perbankan yang melakukan Merger dan Akuisisi Lintas Negara (CBMA) sesudah pengalihan fungsi pengaturan dan pengawasan dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan seperti yang terlihat pada table berikut

Tabel 4.36 *Independent Sample t Test* Rasio NPL Perbankan BUMN dan Perbankan yang melakukan CBMA

		Independent Samples Test								
		Levene's Test for Equality of Variances		t-test for Equality of Means						
		F	Sig.	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
								Lower	Upper	
Rasio NPL	Equal variances assumed	1.357	.255	-.568	26	.575	-.38025	.66908	-1.75556	.99506
	Equal variances not assumed			-.758	25.002	.456	-.38025	.50187	-1.41386	.65336

Sumber : Data olahan SPSS

Pengambilan keputusan berdasarkan perbandingan  $t$  hitung dengan  $t$  table.  $T$  hitung  $-0.568$  dengan tingkat sig (2 tailed) =  $0.575$  dengan  $df = N-2 = 28-2 = 26$  sehingga nilai  $t$  table =  $2.0555$  pada taraf signifikansi ( $\alpha = 0.05$ ). Jika  $t$  hitung  $\geq t$  table maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima. Jika  $t$  hitung  $\leq t$  table maka  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak. Ternyata  $t$  hitung  $<$  dari  $t$  table atau  $-0.568 < 2.0555$  maka  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak. Tidak terdapat perbedaan kinerja NPL Perbankan BUMN dan Perbankan yang melakukan Merger dan Akuisisi Lintas Negara (CBMA) sesudah pengalihan fungsi pengaturan dan pengawasan Perbankan dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan.

Tabel 4.37 *Independent Sample t Test* Rasio ROA Perbankan BUMN dan Perbankan yang melakukan CBMA

		Levene's Test for Equality of Variances		t-test for Equality of Means						
		F	Sig.	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
									Lower	Upper
Rasio ROA	Equal variances assumed	2.337	.138	5.163	26	.000	2.05725	.39843	1.23827	2.87623
	Equal variances not assumed			4.363	9.673	.002	2.05725	.47155	1.00174	3.11276

Sumber : Data olahan SPSS

Pengambilan keputusan berdasarkan perbandingan  $t$  hitung dengan  $t$  table.  $T$  hitung  $5.163$  dengan tingkat sig (2 tailed) =  $0.000$  dengan  $df = N-2 = 28-2 = 26$  sehingga nilai  $t$  table =  $2.0555$  pada taraf signifikansi ( $\alpha = 0.05$ ). Jika  $t$  hitung  $\geq t$  table maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima. Jika  $t$  hitung  $\leq t$  table maka  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak. Ternyata  $t$  hitung  $>$  dari  $t$  table atau  $5.163 > 2.0555$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima. Terdapat perbedaan kinerja ROA

#### 4.3.3.3 ROA pada Perbankan BUMN dan Perbankan yang melakukan CBMA sesudah pengalihan fungsi pengaturan dan Pengawasan Perbankan dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan. (H3.3)

Dengan menggunakan bantuan SPSS 21.00 didapatkanlah hasil *Independent Sample t Test* masing-masing variabel kinerja rasio ROA Perbankan BUMN dan Perbankan yang melakukan Merger dan Akuisisi Lintas Negara (CBMA) sesudah pengalihan fungsi pengaturan dan pengawasan dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan seperti yang terlihat pada table berikut :

Perbankan BUMN dan Perbankan yang melakukan Merger dan Akuisisi Lintas Negara (CBMA) sesudah pengalihan fungsi pengaturan dan pengawasan Perbankan dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan.

#### 4.3.3.4 BOPO pada Perbankan BUMN dan Perbankan yang melakukan CBMA sesudah pengalihan fungsi pengaturan dan Pengawasan

**Perbankan dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan. (H3.4)**

Dengan menggunakan bantuan SPSS 21.00 didapatkan hasil *Independent Sample t Test* masing-masing variabel kinerja rasio BOPO Perbankan

BUMN dan Perbankan yang melakukan Merger dan Akuisisi Lintas Negara (CBMA) sesudah pengalihan fungsi pengaturan dan pengawasan dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan seperti yang terlihat pada table berikut :

Tabel 4.38 *Independent Sample t Test* Rasio BOPO Perbankan BUMN dan Perbankan yang melakukan CBMA

		Independent Samples Test								
		Levene's Test for Equality of Variances		t-test for Equality of Means						
		F	Sig.	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
								Lower	Upper	
Rasio BOPO	Equal variances assumed	.298	.590	-4.747	26	.000	-17.26475	3.63734	-24.74141	-9.78809
	Equal variances not assumed			-4.603	12.183	.001	-17.26475	3.75084	-25.42357	-9.10593

Sumber : Data olahan SPSS

Pengambilan keputusan berdasarkan perbandingan *t* hitung dengan *t* table. *T* hitung -4.747 dengan tingkat sig (2 tailed) = 0.000 dengan *df* = *N*-2 = 28-2 = 26 sehingga nilai *t* table = 2.0555 pada taraf signifikansi ( $\alpha = 0.05$ ). Jika *t* hitung  $\geq$  *t* table maka *H*<sub>0</sub> ditolak dan *H*<sub>1</sub> diterima. Jika *t* hitung  $\leq$  *t* table maka *H*<sub>0</sub> diterima dan *H*<sub>1</sub> ditolak. Ternyata *t* hitung > dari *t* table atau 4.747 > 2.0555 maka *H*<sub>0</sub> ditolak dan *H*<sub>1</sub> diterima. Terdapat perbedaan kinerja BOPO Perbankan BUMN dan Perbankan yang melakukan Merger dan Akuisisi Lintas Negara (CBMA) sesudah pengalihan fungsi pengaturan dan pengawasan Perbankan dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan.

**4.3.3.5 LDR pada Perbankan BUMN dan Perbankan yang melakukan CBMA sesudah pengalihan fungsi pengaturan dan Pengawasan Perbankan dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan. (H3.5)**

Dengan menggunakan bantuan SPSS 21.00 didapatkan hasil *Independent Sample t Test* masing-masing variabel kinerja rasio LDR Perbankan BUMN dan Perbankan yang melakukan Merger dan Akuisisi Lintas Negara (CBMA) sesudah pengalihan fungsi pengaturan dan pengawasan dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan seperti yang terlihat pada table berikut :

Tabel 4.39 *Independent Sample t Test* Rasio LDR Perbankan BUMN dan Perbankan yang melakukan CBMA

		Independent Samples Test								
		Levene's Test for Equality of Variances		t-test for Equality of Means						
		F	Sig.	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
									Lower	Upper
Rasio LDR	Equal variances assumed	3.077	.091	-.062	26	.951	-.21175	3.44253	-7.28798	6.86448
	Equal variances not assumed			-.050	9.275	.961	-.21175	4.20069	-9.67163	9.24813

Sumber : Data olahan SPSS

Pengambilan keputusan berdasarkan perbandingan  $t$  hitung dengan  $t$  table.  $T$  hitung  $-0.062$  dengan tingkat sig (2 tailed) =  $0.951$  dengan  $df = N-2 = 28-2 = 26$  sehingga nilai  $t$  table =  $2.0555$  pada taraf signifikansi ( $\alpha = 0.05$ ). Jika  $t$  hitung  $\geq t$  table maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima. Jika  $t$  hitung  $\leq t$  table maka  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak. Ternyata  $t$  hitung  $<$  dari  $t$  table atau  $-0.062 < 2.0555$  maka  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak. Tidak terdapat perbedaan kinerja LDR Perbankan BUMN dan Perbankan yang melakukan Merger dan Akuisisi Lintas Negara (CBMA) sesudah pengalihan fungsi pengaturan dan pengawasan Perbankan dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan.

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pada Perbankan BUMN, hanya rasio kinerja yang diukur melalui BOPO Dan LDR saja yang mengalami perbedaan signifikan setelah adanya

pengalihan fungsi pengaturan dan pengawasan Perbankan dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan. Sedangkan untuk variabel CAR, NPL dan ROA juga mengalami perbedaan tetapi tidak signifikan.

2. Pada Perbankan yang melakukan Merger dan Akuisisi Lintas Negara (CBMA), hanya rasio kinerja yang diukur melalui NPL, ROA dan BOPO saja yang mengalami perbedaan signifikan setelah adanya pengalihan fungsi pengaturan dan pengawasan Perbankan dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuanagn. Sedangkan untuk variabel CAR dan LDR juga mengalami perbedaan tetapi tidak signifikan.
3. Setelah terjadinya pengalihan fungsi pengaturan dan pengawasan Perbankan dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan, terdapat perbedaan yang signifikan pada rata-rata rasio ROA dan BOPO Perbankan BUMN dan Perbankan yang melakukan CBMA, sedangkan untuk rasio CAR, NPL dan LDR Perbankan BUMN dan BOPO tidak menunjukkan perbedaan yang



signifikan sesudah terjadinya pengalihan fungsi pengaturan dan pengawasan Perbankan dari Bank Indonesia ke otoritas Jasa keuangan.

### Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti mencoba memberikan saran diantaranya :

1. Bagi Perbankan BUMN dan Perbankan yang melakukan Merger dan Akuisisi Lintas Negara (CBMA) dapat menyusun strategi dalam meningkatkan kinerja dan dapat segera beradaptasi terkait adanya pengalihan fungsi pengaturan dan pengawasan Perbankan dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan.
2. Bagi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia dapat bekerjasama sebagai regulator untuk dapat merumuskan kebijakan yang semakin berdampak positif terhadap kinerja Perbankan yang ada di Indonesia sehingga Perbankan dapat semakin meningkatkan kinerjanya kearah yang lebih positif kedepannya.
3. Bagi para Investor, dalam memilih perusahaan perbankan yang akan dijadikan objek investasi dapat memilih Perbankan mana yang memiliki kinerja baik setelah adanya pengalihan fungsi pengaturan dan pengawasan Perbankan dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan.
4. Penelitian kedepan dapat melakukan penelitian yang sama dengan menambah alat ukur selain menilai kinerja Perbankan seperti NIM (Net Interest Margin), LFR (Loan to Funding Ratio), dan unsur-unsur lainnya seperti unsur-unsur manajemen sebelum dan sesudah

pengalihan fungsi pengaturan dan pengawasan Perbankan dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan serta memperluas jumlah observasi dengan periode waktu yang lebih lama. Kemudian juga kedepannya dapat meneliti dan menggali lebih dalam apakah terdapat pengaruh merger dan akuisisi terhadap kinerja Perbankan

### DAFTAR PUSTAKA

- Bank Indonesia (2010), *Menyingkap Tabir Seluk Beluk Pengawasan Bank*. Jakarta
- Booklet Perbankan Indonesia, Edisi 1 2014
- Booklet Perbankan Indonesia, Edisi 1 2015
- Sugiyono. 2001, *Metode Penelitian Bisnis, Bandung* ; Alfabeta
- Teguh Pudjo Mulyono. 2003, *Analisa Laporan Keuangan Untuk Perbankan*. Jakarta ; Djambatan
- Tryo Hasnah Mouri (2012), *Analisis Pengaruh Car, Npl, Nim, Bopo, Dan Ldr Terhadap Reprun On Asset (Studi Pada Bank Umum Go Public Di Bursa Efek Indonesia Periode 2007-2008)*.
- Winarni. *Analisis Pengaruh Car, Nim, Bopo, Ldr, Sbi, Dan Kurs Terhadap Roa (Studi Komparasi Antara Bank Umum Swasta Nasional Dan Bank Asing)*.